

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengangguran adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi erat berhubungan dengan masalah pengangguran. Jika ekonomi berkembang, maka akan menyerap tenaga kerja secara langsung. Namun, jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan ada lebih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan sehingga pengangguran di Indonesia semakin meningkat (Dewi, 2020).

Meningkatnya jumlah pengangguran juga berdampak pada masalah sosial lainnya, seperti peningkatan tingkat kemiskinan karena tingkat pendapatan akan turun untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang, tidak memiliki pekerjaan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Krisis sosial dan ekonomi akan terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan. Setiap orang dapat mengalami kehilangan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan, terutama selama pandemi Covid-19. Banyak perusahaan yang telah memulangkan karyawannya, dan beberapa perusahaan bahkan harus berhenti beroperasi karena kekurangan pemasukan (Setyaningsih et al., 2022).

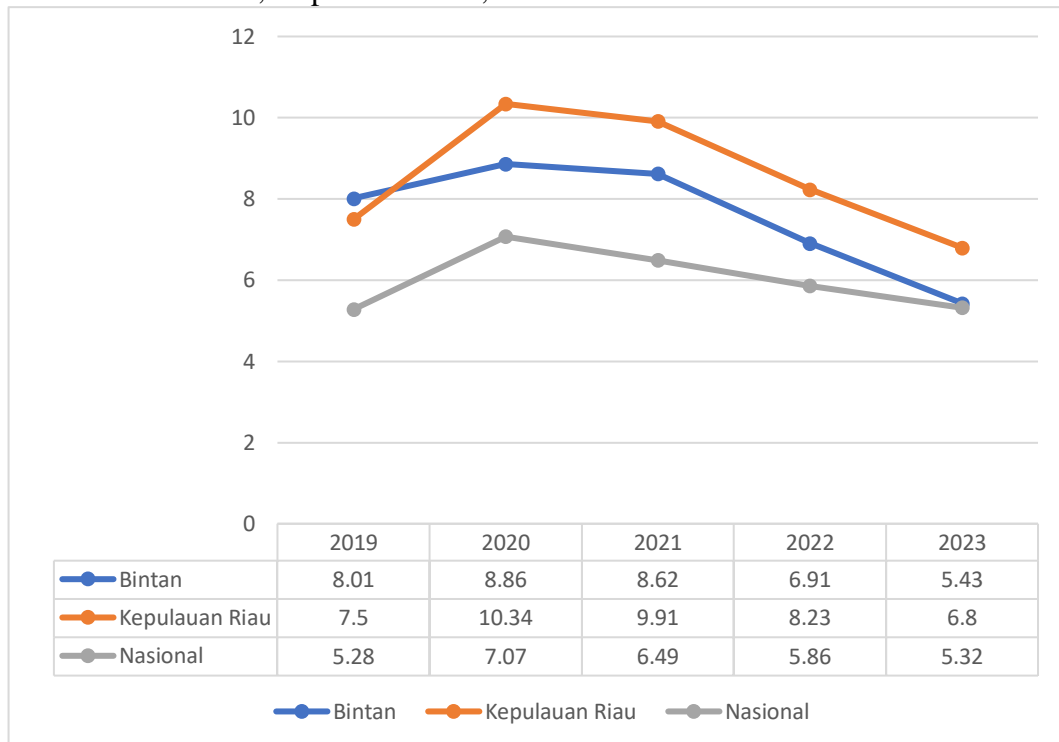
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab 2 Pasal 4 menyatakan bahwa Pembangunan ketenagakerjaan salah satu tujuannya yaitu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan

daerah. Pembangunan tenaga kerja sebagai salah satu unsur pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan dapat meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang dari total angkatan kerja sebanyak 147,71 juta, atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32 persen. Angka ini turun sebesar 0,54 persen dibandingkan Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang. Masalah pengangguran tidak hanya ada di tingkat nasional tetapi juga di tingkat daerah salah satunya di Kabupaten Bintan.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bintan dalam kurun waktu tahun 2019-2023 terjadi perkembangan peningkatan dan penurunan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 8,01%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 8,86% kemudian menurun kembali menjadi sebesar 8,62% pada tahun 2021, pada tahun 2022 sebesar 6,91% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 5,43%. Hal ini menunjukkan tren yang positif dengan penurunan yang konsisten selama tiga tahun terakhir. Secara jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

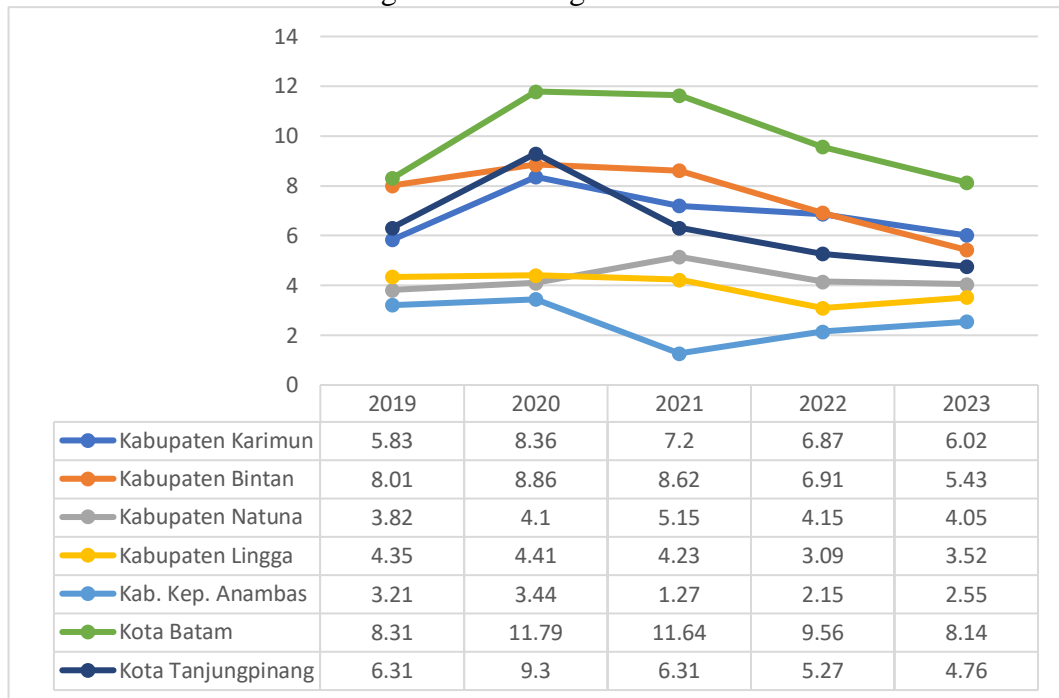
Gambar 1.1 Perbandingan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024 (telah diolah kembali).

Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan sebesar 5,43% yang berada tidak jauh dari angka nasional sebesar 5,32% dan lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka provinsi Kepulauan Riau sebesar 6,8%. Persentase tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Turunnya persentase pengangguran seiring dengan ketersediaan lapangan kerja yang membaik serta dampak dari perekonomian yang terus tumbuh. Hal tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi dan ketenagakerjaan yang maksimal di wilayah Kabupaten Bintan.

Gambar 1.2 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota, Agustus 2019-Agustus 2023



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024 (telah diolah kembali).

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di tingkat Kabupaten/Kota hanya ada lima Kabupaten/Kota di Kepri yang mengalami penurunan TPT. Kabupaten yang mengalami peningkatan TPT yaitu Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Penurunan tingkat pengangguran terbuka periode 2022-2023 terbesar di Kepulauan Riau terjadi di Kabupaten Bintan yaitu 1,48 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan berhasil mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan menurunnya angka pengangguran terhadap sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Dahulu Kabupaten ini bernama Kabupaten Kepulauan Riau yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Bintan berdasarkan PP Nomor 5

Tahun 2006. Ibu Kota Kabupaten Bintan adalah Bandar Seri Bentan yang terletak di Kecamatan Teluk Bintan. Jumlah penduduk Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2023 sebanyak 175.873 jiwa.

Karakteristik Kabupaten Bintan yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata dan industri sehingga membuat banyaknya para pencari kerja yang berasal dari Bintan maupun yang berasal dari luar Bintan yang mencari kerja di Kabupaten Bintan. Pulau ini terkenal dengan pantai-pantai yang indah, seperti Pantai Trikora dan pantai di Lagoi. Industri pariwisata di Bintan menciptakan banyak peluang pekerjaan, terutama di sektor perhotelan, resort dan restoran.

Kabupaten Bintan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus yang menarik investasi dan perusahaan. Beberapa perusahaan besar beroperasi di sini, termasuk dalam sektor manufaktur, elektronik, dan logistik. Ini menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat. Kabupaten Bintan akan mendorong agar Kawasan Ekonomi Khusus akan memanfaatkan tenaga kerja lokal Bintan untuk bekerja di sana. Selain itu akan terus dilakukan pelatihan-pelatihan khusus dan berkelanjutan agar tenaga kerja lokal Bintan siap untuk bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus. Meningkatkan keseriusan penanganan isu ketenagakerjaan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Bintan serta meningkatkan kualitas SDM dengan mendirikan Politeknik Industri agar masyarakat Bintan dapat mengisi pasar kerja di Bintan.

Permasalahan pengangguran di Kabupaten Bintan dari tahun 2019 dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat diikuti dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bintan. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) yang lebih tinggi menunjukkan bahwa banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk dan Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Komposisi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	159.403	159.518	162.561	165.781	165.890
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas	113.097	121.523	122.519	124.419	123.757
Angkatan Kerja	70.092	74.475	77.424	82.163	83.592
Angkatan Kerja yang telah Bekerja	64.479	67.874	70.748	76.483	79.049
Pengangguran	5.613	6.601	6.676	5.680	4.543
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	8,01	8,86	8,62	6,91	5,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2024 (telah diolah kembali).

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk dan penduduk berumur 15 tahun ke atas terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut juga disertai dengan peningkatan kenaikan angkatan kerja dan angkatan kerja yang telah bekerja. Berbeda halnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan sebesar 8,01 persen. Namun, pada tahun 2020 atau masa pandemi covid-19, persentase TPT mengalami kenaikan dengan persentase 8,86 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bintan pada Agustus 2022 mencapai 6,91 persen, turun dibandingkan TPT pada Agustus 2021 sebesar 8,62 persen, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan lagi menjadi 5,43 persen. Jika diamati, penurunan angka pengangguran di Kabupaten Bintan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada

tahun 2021 hingga 2023, pemerintah daerah Kabupaten Bintan berhasil melakukan penekanan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan sehingga kesejahteraan masyarakat juga dapat terus meningkat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai semua orang di usia kerja yang siap untuk bekerja, baik orang yang sudah bekerja, orang yang tidak bekerja karena sakit, cuti, atau alasan lainnya, dan orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan (Udin et al., 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, adapun persentase tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
2019	80,11	42,69
2020	82,39	38,36
2021	82,32	42,75
2022	84,03	46,87
2023	85,06	48,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2024 (telah diolah kembali).

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin di Kabupaten Bintan, pada tahun 2020 TPAK laki-laki mengalami peningkatan menjadi 82,39 persen dari tahun 2019 sebesar 80,11 persen. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 82,32 persen. Pada tahun 2021-2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 2,74 persen. Sehingga pada tahun 2023 untuk TPAK laki-laki sebesar 85,06 persen. Untuk TPAK perempuan pada tahun

2019 sebesar 42,69 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 38,36 persen. Kemudian pada tahun 2020-2023 mengalami kenaikan sebesar 10,50 persen sehingga pada tahun 2023 untuk TPAK perempuan sebesar 48,86 persen. Berdasarkan jenis kelamin TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.

Mengacu kepada visi yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Bintan, pada salah satu misinya dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026 tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatnya penanganan pengangguran melalui penyusunan perencanaan tenaga kerja, peningkatan kompetensi calon tenaga kerja, peningkatan penyerapan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, penanganan hubungan perselisihan kerja. Kebijakan pembangunan daerah berdasarkan tujuan dan sasaran dengan arah kebijakan yaitu penurunan pengangguran difokuskan pada peningkatan kompetensi, sertifikasi, kapasitas tenaga kerja sesuai dengan pangsa pasar. Program pembangunan daerah Kabupaten Bintan dalam penurunan pengangguran yaitu program perencanaan tenaga kerja, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program hubungan industrial.

Upaya pemerintah Kabupaten Bintan dalam meningkatkan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran yaitu melaksanakan *job fair*, memberikan pelatihan untuk pencari kerja, dan aktif memberikan informasi lowongan pekerjaan di sosial media serta adanya aplikasi silancar (Sistem Layanan Pencari Kerja) sebagai media penunjang serta sebagai sebuah sistem aplikasi pelayanan dan pendataan ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan. Silancar memiliki pelayanan



terdiri dari Pelayanan AK1 (Kartu Kuning), pelayanan informasi lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendataan pencari kerja dan tenaga kerja.

Meskipun telah terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bintan. Namun perlu ditekankan bahwa peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja sangat penting untuk meningkatkan daya serap industri dan sektor usaha terhadap tenaga kerja lokal. Pentingnya strategi dalam penelitian ini adalah untuk menentukan langkah yang akan diambil untuk mengatasi isu dan permasalahan pengangguran dimana strategi yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan berperan penting untuk melakukan penanganan terhadap masalah ketenagakerjaan salah satunya yaitu pengangguran. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Bintan”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah pokok-pokok masalah yang akan diteliti dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahannya adalah bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah fokus dari penelitian atau hal yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Keberhasilan sebuah penelitian ketika memberikan manfaat jangka pendek atau panjang dalam kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan wawasan dan keilmuan bagi perkembangan ilmu pemerintahan mengenai strategi pemerintah daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023. Penelitian ini juga diharapkan sebagai sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang serupa.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman langsung serta menambahkan pemahaman baik secara teori maupun menerapkan teori terkait strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas yang berkaitan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bintan Tahun 2019-2023.

